

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun 2024 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika. Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 27 Februari 2025
Pit. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Mohammad Hasan Falsol, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19830714 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	3
D. Landasan Hukum.....	5
E. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Tujuan RPD Tahun 2024-2026	6
C. Tujuan dan Sasaran	7
D. Indikator Kinerja Utama	8
E. Rencana Kerja Tahun 2024.....	9
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	45
B. Realisasi Anggaran	25
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk

memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomer 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai wewenang melakukan penyajian informasi kepada masyarakat melalui media secara online di Kabupaten Bangkalan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator dan Kelompok jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

C. Isu strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2024 - 2026 sebagai berikut :

1. SDM aparatur yang ada belum memiliki kepemimpinan (leadership commitment) yang memadai untuk melaksanakan SPBE. Belum bersungguh-sungguh meninggalkan kepemimpinan ego sektoral serta belum bersinergi agar bersama-sama memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara SPBE memerlukan keterpaduan dan keterhubungan antar semua perangkat daerah untuk membangun satu kesatuan pemerintahan yang utuh. Akibatnya SPBE belum dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal;
2. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam menerapkan SPBE antara lain di bidang perencanaan, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, keamanan dan keandalan informasi, pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsive;

3. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis untuk pengelolaan dan penyediaan konten informasi bahan diseminasi seperti di bidang multi media, desain grafis, jurnalistik, serta dasar-dasar ilmu komunikasi lainnya;
4. Regulasi dan peraturan-perundangan yang ada terkait pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum ditindaklanjuti dengan pedoman- pedoman teknis seperti standar operasional prosedur (SOP). Dalam proses bisnis SPBE berbagai macam layanan terhadap pengguna perlu diatur dengan SOP untuk memperjelas proses pelayanan;
5. Kelembagaan TIK yang sudah terbentuk belum sepenuhnya dipahami maksud dan tujuannya, akibatnya kelembagaan yang sedianya untuk mempertegas otoritas dan disposisi tidak berjalan. Hal ini sebagai akibat kurangnya sosialisasi;
6. Data Center dan Disaster Recovery Center belum memenuhi kapasitas maksimal untuk menjamin peran selaku integrator bagi keberlangsungan pelayanan pengguna SPBE baik intra pemerintah maupun masyarakat
7. Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Bangkalan sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media social;
8. Penyediaan Data Sektoral sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama.
9. Perlunya langkah – langkah penyiapan untuk merumuskan integrasi data.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mulai meningkatnya kesadaran akan pentingnya leadership komitmen khususnya Satuan Perangkat Daerah.
2. Untuk data center Diskominfo Kabupaten bangkalan sudah memulai memanfaatkan pusat data nasional namun pusat data yang berada di daerah perlu memerlukan perawatan.
3. Forum data tingkat kabupaten sudah mulai berjalan dan memiliki portal data sektoral dan parcial.

4. Bakohumas kecamatan sudah terbentuk, serta kecamatan sudah mulai memiliki sosial media yang nantinya akan membantu penyebaran informasi di tingkat kecamatan dan desa.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Tahun 2024 - 2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan RPD Tahun 2024 - 2026

Tujuan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Menurunkan angka kemiskinan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada tujuan ke-4, yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%	20%	22%
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	22%	44%	88%
4	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	22%	50%	75%

			perencanaan pembangunan daerah			
5	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	60	61	62
6	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Indeks kepuasan masyarakat	85	87	90

D. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Satker yang telah terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh satker}} \times 100$	DISKOMINFO Bangkalan
2	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	Persentase	OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan keterbukaan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	DISKOMINFO Bangkalan
3	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase	Keamanan informasi pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah serangan yang berhasil teratasi}}{\text{Jumlah serangan dalam satu tahun}} \times 100$	DISKOMINFO Bangkalan

4	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik}}{\text{Jumlah semua OPD}} \times 100$	DISKOMINFO Bangkalan
5	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	Nilai	Nilai Sakip PD		DISKOMINFO Bangkalan
6	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai SKM	DISKOMINFO Bangkalan

E. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	18
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	Persentase	100
3	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase	22

4	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	22
5	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	Nilai	60
6	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	85

Sumber : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024 - 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 31 Januari 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan informatika telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%
2	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100%

3	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	22%
4	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22%
5	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	60
6	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Indeks kepuasan masyarakat	85

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	85
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka - skpd	1
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa - skpd	1
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa - skpd	1
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63

13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	66
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	14
21	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD	100
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1
31	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan PD	80
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5
35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	80
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25
40	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100
41	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	100
42	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1
43	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12
44	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12

45	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66
46	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	18
47		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18
48	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	18
49	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	3
50	Program penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22
51	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan statistik di lingkup PD	22
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1
53	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	44
54	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	20
55	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	22
56	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD	22
57	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	61

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan

revisi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18	18	100	Sangat Tinggi	Diskominfo Bangkalan
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100	100	100	Sangat Tinggi	Diskominfo Bangkalan
3	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	22	22	100	Sangat Tinggi	Diskominfo Bangkalan
4	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22	22	100	Sangat Tinggi	Diskominfo Bangkalan
5	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Nilai Sakip PD	60	64,05	106,75	Sangat Tinggi	Diskominfo Bangkalan
6	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Indeks kepuasan masyarakat	85	84,31	99,19	Sangat Tinggi	Diskominfo Bangkalan

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pencapaian indikator kinerja yaitu 100 dengan predikat kinerja sesuai kategori “Tinggi” dengan rincian sebagai berikut :

- Indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan indeks 84,31. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini didapat dari hasil survey yang dilakukan terhadap seluruh masyarakat sebagai responden terkait pelayanan kesekretariatan.
- Indikator kinerja “Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi” dengan persentase sebesar 18%. Tercapainya target dikarenakan publik bisa mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan secara online dimana saja.
- Indikator kinerja “Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik” dengan persentase sebesar 100%. Tercapainya target dikarenakan seluruh lapisan masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan Kabupaten Bangkalan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media sosial.
- Indikator kinerja “Persentase keamanan informasi pemerintah daerah” dengan persentase sebesar 22%. Tercapainya target dikarenakan sistem yang mendukung dan SDM yang mumpuni dibidang keamanan.
- Indikator kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah” dengan persentase sebesar 22%. Tercapainya target dikarenakan *collecting* data dan adanya aplikasi Open Data Bangkalan yang berisikan data statistik sektoral sehingga memudahkan berbagai pihak memperoleh data.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,92	3,67	79,56
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18	N/A	N/A

3	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi public	100	N/A	N/A
4	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	22	N/A	N/A
5	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22	N/A	N/A
6	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	64,05	N/A	N/A
7	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Indeks kepuasan masyarakat	84,31	N/A	N/A

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,35	2,92	124%	Kolaborasi antarlembaga, manajemen proyek yang efektif, dan penggunaan teknologi yang tepat	Akan terus melakukan kolaborasi terhadap seluruh pihak terkait di Bangkalan
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18	18	100	Adanya sinergitas antar SKPD sehingga layanan publik dapat dinikmati oleh masyarakat	Terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait
3	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100	100	100	OPD telah melakukan updating informasi secara berkala sehingga kesenjangan informasi kepada publik berkurang	Melakukan updating informasi secara berkala
4	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	22	22	100	Perbaikan terhadap sistem keamanan terus dilakukan yang mana juga di dukung oleh SDM yang mumpuni di bidang terkait	Updating sistem keamanan secara berkala

5	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22	22	100	Diluncurkannya aplikasi Open Data Bangkalan sehingga memudahkan seluruh lapisan memperoleh data yang dibutuhkan	<i>Collecting dan updating data terhadap seluruh OPD dilakukan secara terus-menerus</i>
6	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	60	64,05	106,75	Adanya koordinasi internal yang solid sehingga target tercapai	Melakukan koordinasi setiap kali ada perubahan yang berkaitan dengan kinerja Diskominfo
7	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Indeks kepuasan masyarakat	85	84,31	99,19	Dikarenakan rentang waktu pengisian nilai SKM sebentar sehingga nilai SKM belum maksimal	<i>Sounding lebih intens dalam pengisian nilai SKM</i>

Uraian penjelasan tabel:

- Capaian Indikator Kinerja “Indeks SPBE” sebesar 124%.
- Capaian Indikator Kinerja “Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi” sebesar 100%.
- Capaian Indikator Kinerja “Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik” sebesar 100 %.
- Capaian Indikator Kinerja “Persentase keamanan informasi pemerintah daerah” sebesar 100%.
- Capaian Indikator Kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah” sebesar 100%.
- Capaian Indikator Kinerja “Nilai Sakip PD” sebesar 106.75%.
- Capaian Indikator Kinerja “Indeks kepuasan masyarakat” sebesar 99.19%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	106,75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	99,19	Menunjang
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Indeks kepuasan masyarakat	99,19				
2				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
3				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang
4				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka - skpd	100	Menunjang
5				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	Menunjang
6				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa - skpd	100	Menunjang

7				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa - skpd	100	Menunjang
8				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	100	Menunjang
9				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
10				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	Menunjang
11				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98,41	Menunjang
12				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang
13				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	77	Menunjang
14				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	63	Menunjang

15				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	100	Menunjang
16				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD	100	Menunjang
17				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
18				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
19				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
20				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan PD	80	Menunjang
21				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang
22				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
23				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
24				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	80	Menunjang
25				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Menunjang

26				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang
27	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100	Menunjang
28				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	100	Menunjang
29				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	100	Menunjang
30				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	100	Menunjang
31				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	100	Menunjang
32				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang

33	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Menunjang
34					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Menunjang
35				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Menunjang
36				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	100	Menunjang
37	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Program penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Menunjang
38				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan statistik di lingkup PD	100	Menunjang
39				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100	Menunjang
40				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100	Menunjang

41				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	100	Menunjang
42	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	100	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	Menunjang
43				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD	100	Menunjang
44				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	100	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tinggi. Untuk selanjutnya di tahun tahun yang akan datang Diskominfo selaku lembaga yang mendukung *smart governance* melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan melakukan strategi dan kebijakan melalui pengembangan infrastruktur, jalur media informasi dan kualitas data statistik.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.749.220.332,00	6.569.088.546,00	97,33
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	2.159.000,00	2.130.250,00	98,67
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.368.385.678,00	5.271.564.040,00	98,20
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	350.000,00	350.000,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.905.321,00	20.904.071,00	99,99
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1.336.715.342,00	1.253.435.194,00	93,77

	Pemerintahan Daerah			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.704.991,00	20.704.991,00	100,00
8	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.861.940.000,00	1.775.904.220,00	95,38
9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.861.940.000,00	1.775.904.220,00	95,38
10	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.000.000.000,00	990.500.000,00	99,05
11	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	990.500.000,00	99,05
12	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	25.000.000,00	24.207.850,00	96,83
13	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.207.850,00	96,83
14	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
15	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	18	18	100	1.000.000.000,00	990.500.000,00	99,05	0,95
2	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	100	100	100	1.861.940.000,00	1.775.904.220,00	95,38	4,62
3	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	22	22	100	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
4	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	22	22	100	25.000.000,00	24.207.850,00	96,83	3,17

5	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	60	64,05	106,75	6.749.220.332,00	6.569.088.546,00	97,33	9,42
6	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	85	84,31	99,19			1,86	

Uraian penjelasan tabel:

- Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 99.05% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 0.95.
- Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat (IKP) dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 95.38% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 4.62.
- Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat (Persandian) dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 100% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 0.
- Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat (SD-TIK) dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 96.83% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 3.17.
- Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika dengan persentase capaian kinerja sebesar 106.75% untuk Nilai SAKIP dan 99.19% untuk indeks kepuasan masyarakat dengan persentase capaian anggaran sebesar 97.33% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 2.09.
- Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan dengan persentase capaian kinerja sebesar 75,14% untuk nilai SAKIP dan persentase capaian anggaran sebesar 99.67% untuk indeks kepuasan masyarakat sehingga tingkat efisiensinya sebesar 9.42 untuk Nilai SAKIP dan 1.86 untuk indeks kepuasan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 124% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% masing - masing (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan capaian kinerja Nilai SAKIP 106.75% dan capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat sebesar 99.19% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.612.734.989 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.

9.362.700.616, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 97.40% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2.60%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 27 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangkalan



Mohammad Hasan Paisol, S.STP., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19830714 200112 1 002